



Proceeding



International Seminar of Inter Islamic University Cooperation 2017

BOOK I

Globalization, AEC, Economic Development

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

April 25th-27th 2017

ISBN : 978-602-749-830-3

PROCEEDING

Internasional Seminar of Inter Islamic University Cooperation 2017

April 25-27, 2017

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, INDONESIA 73111

CHIEF EDITOR

Mohammad Rizki Fadhil Pratama, S.Farm., M.Si., Apt.

TEAM EDITOR

Muh. Azhari, M.Si.

Nanang Hanafi, S.Hut., M.Si.

Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.

REVIEWER

Prof. Dr. Detri Karya, MA.

Prof. Dr. Nasir Hamzah, SE., M.Si.

Prof. Dr. Syahnur Said, MS.

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

In Collaboration with The Committee of The Internasional Seminar of Inter Islamic University Cooperation 2017

Palangka Raya, Central Borneo, INDONESIA

PROCEEDING

Internasional Seminar of Inter Islamic University Cooperation 2017

This work is copyright. No Part may be reproduced by any process without prior written permission from The Editors. Requests and inquiries concerning reproduction should be addressed to Mohammad Rizki Fadhil Pratama, Muh. Azhari, Nanang Hanafi, and Rita Rahmaniati, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Central Borneo, Indonesia or email to m.rizkifadhil@umpalangkaraya.ac.id.

The intellectual properties of each paper included in this proceeding remains vested in the Authors as listed on the papers.

Cover Designed by

Mohammad Rizki Fadhil Pratama, S.Farm., M.Si., Apt.

Layout Designed by

Mohammad Rizki Fadhil Pratama, S.Farm., M.Si., Apt.

Published by

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

RTA Milono St. Km.1,5 Palangka Raya 73111

Email: humas@umpalangkaraya.ac.id

In Collaboration with The Committee of The Internasional Seminar of Inter Islamic University Cooperation 2017 in Palangka Raya, Central Borneo, INDONESIA

TABLE OF CONTENTS

Proposing a Single Currency Area in ASEAN-5 Countries for Strengthening ASEAN Economic Community

Dimas Bagus Wiranatakusuma / *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

1 – 14

Optimalisasi Perbankan Syariah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Hamdi Agustin / *Universitas Islam Riau*

16 – 24

Analisis Respon Perubahan Ekonomi terhadap Penurunan Kemiskinan di Provinsi Riau

Heriyanto & Desy Mardianty / *Universitas Islam Riau*

25 – 39

Pemanfaatan Limbah Industri Tahu dalam meningkatkan Nilai Ekonomi Masyarakat dan Meminimalisir Pencemaran Lingkungan

Muhammad Azhari / *Universitas Muhammadiyah Palangkaraya*

40 – 45

Implementasi Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palangka Raya

Iin Nurbudiyani / *Universitas Muhammadiyah Palangkaraya*

46 – 55

Identifikasi, Analisis dan Implementasi Sistem Pengukuran Berbasis Dimensi Rasionalitas dan “Wahyu Illahi” secara Komprehensif sebagai Instrumen Evaluasi Kebijakan Ekonomi Kabinet Kerja

Jadi Suriadi / *Azzahra University*

56 – 69

Pengusaha Muda yang Berwawasan “More Thinking The Others”

Muhammad Tri Ramdhani / *Universitas Muhammadiyah Palangkaraya*

70 – 82

Analisis Penerapan Tax Amnesty terhadap Kegiatan Akuntansi Guna Meningkatkan Sumber Penerimaan Negara

Santi Endriani / *Universitas Muhammadiyah Palangkaraya*

83 – 96

► Analisis Respon Perubahan Ekonomi terhadap Penurunan Kemiskinan di Provinsi Riau

Heriyanto & Desy Mardianty

Universitas Islam Riau

E-mail: heriyanto@agr.uir.ac.id

Abstrak

Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dilihat dari tingkat kemiskinannya. Tingginya tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selama ini, belum memberikan hasil yang maksimal terutama program penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, secara teoritis terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan, namun faktor-faktor yang responsif mempengaruhi berbeda-beda antar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon perubahan ekonomi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan. Untuk itu, model persamaan regresi berganda dibangun pada studi ini dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series yang terkait dengan kemiskinan tahun 1993-2014. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling responsif kemiskinan adalah rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup dan pengangguran. Selanjutnya dampak perubahan peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi, pengeluaran pembangunan dan penurunan jumlah penduduk berdampak positif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau. Dari temuan tersebut dapat dinyatakan bahwa pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata disetiap golongan masyarakat, peningkatan IPM melalui rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup, penciptaan lapangan kerja melalui investasi, dan belanja APBD yang terkait belanja langsung pemerintah, peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan serta meningkatkan program keluarga berencana dan memberikan pelayanan kesehatan gratis. Selanjutnya pengurangan pengangguran dengan melaksanakan program-program pembangunan padat karya yang melibatkan rumah tangga miskin.

Kata Kunci

Perubahan Ekonomi, Responsif, Kemiskinan

Pendahuluan

Banyak para ahli ekonom yang mengartikan tentang pertumbuhan ekonomi dari

berbagai sudut pandang. Suryana (2000) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan GDP (Gross Domestic

Product) tanpa melihat besar kecilnya pertumbuhan penduduk dan tanpa melihat adanya perubahan struktur ekonomi. Boediono (1999) mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Sukirno (2007) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dua segi pengertian yang berbeda dalam analisis makro ekonomi. Di satu segi pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu perekonomian mengalami perkembangan dan mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi, sedangkan di segi lain pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Menurut salah satu ekonom besar, Profesor Simon Kuznets dalam Todaro (2000) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.

Tujuan utama pembangunan ekonomi tidak hanya pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak hanya diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto tetapi juga dilihat dari tingkat kemiskinannya (Todaro, 2000).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan dan syarat keharusan bagi penurunan tingkat kemiskinan. Syarat tersebut ialah pertumbuhan ekonomi yang efektif. Artinya, pemerataan pertumbuhan tersebut hendaknya menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus terjadi di sektor-sektor tempat penduduk miskin bekerja, yaitu sektor pertanian atau sektor padat karya. Secara tidak langsung, diperlukan peran pemerintah yang

efektif guna mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin hanya terjadi di sektor modern saja seperti jasa yang padat modal (Siregar dan Wahyuniarti, 2008).

Definisi kemiskinan sangatlah beragam, keberagaman dalam definisi kemiskinan dikarenakan masalah tersebut merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi, melainkan telah meluas ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Todaro (2006) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2007), kemiskinan adalah ketidakmampuan individu atau rumah tangga memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan yang diukur dengan menggunakan garis kemiskinan.

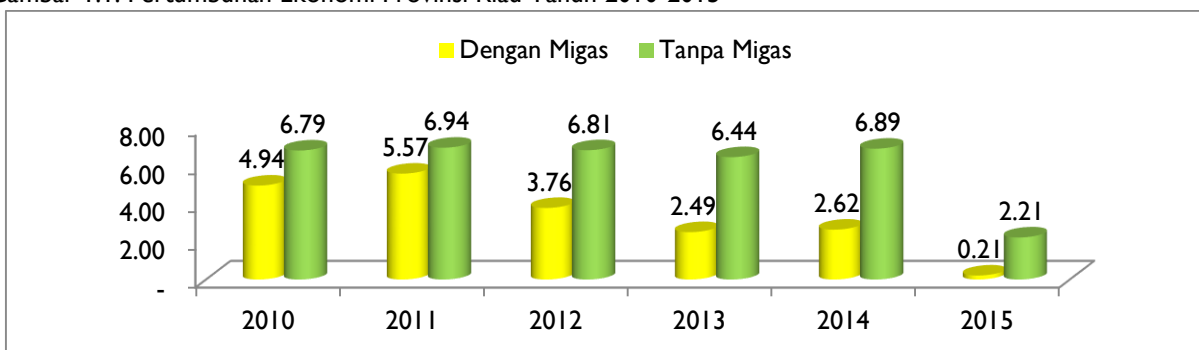
Bappenas (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai taraf tertentu yang dianggap manusiawi. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang menguakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Todaro dan Smith (2006) berpendapat bahwa tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu: tingkat pendapatan nasional rata-rata dan lebar dan sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Provinsi Riau selama periode 2010-2015 mengalami penurunan yang sangat drastis sebanyak 94,03% dengan migas sedangkan tanpa migas sebanyak 21,28%. Selama kurun 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa provinsi Riau mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling

rendah di Sumatera. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara (6,28%) dan Sumatera Barat (6,35%) dan Provinsi Kepulauan Riau (8,26%) serta Jambi (8,69%). Rendahnya pertumbuhan ekonomi provinsi Riau tahun 2015 disebabkan oleh terjadinya penurunan harga komoditas utama yang dihasilkan di provinsi Riau yaitu minyak, gas,

kelapa sawit dan karet. Sementara komoditas tersebut mendominasi lapangan usaha masyarakat di provinsi Riau. Rendahnya harga komoditas tersebut berakibat pada rendahnya gairah masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa dan berakibat pada rendahnya pendapatan dan pengeluaran rumah tangga dan pemerintah.

Gambar 1.1: Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2010-2015

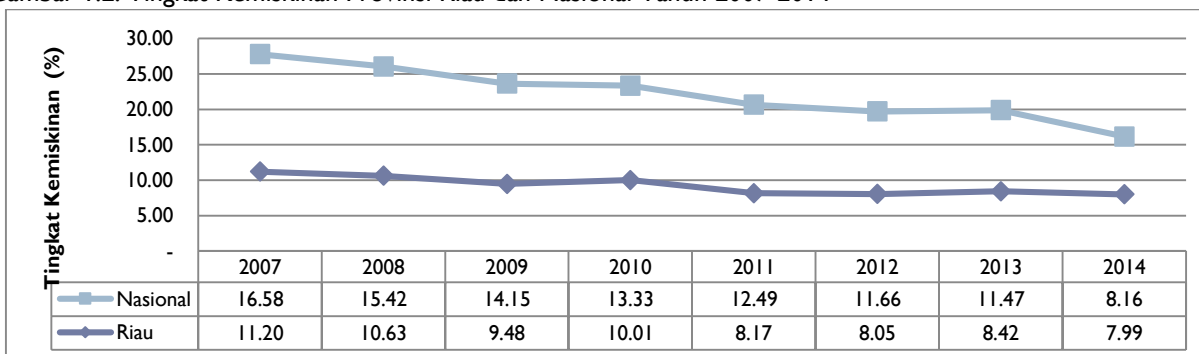


Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2015) dan BRS, 2016

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2015 jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 28513,57 ribu jiwa (11,16%) masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin Riau mencapai 562,92 ribu jiwa (8,87%) dari jumlah penduduk Riau. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek-aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan

secara terpadu. Usaha pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di provinsi Riau memperlihatkan pengaruh yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kemiskinan Provinsi Riau yang mengalami penurunan. Namun demikian, apabila dilihat berdasarkan indeks kedalaman keparahan kemiskinan, kemiskinan di Provinsi Riau masih tergolong tinggi.

Gambar 1.2: Tingkat Kemiskinan Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2007-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik (Riau dalam Angka 2008-2015)

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga harus bisa sekaligus mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan (BPS Indonesia, 2015).

Pemerintah harus melakukan upaya upaya untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi, diantaranya memperluas lapangan kerja, memperbaiki layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Hal yang sudah dilakukan pemerintah adalah melakukan program pengentasan kemiskinan adalah dengan membuat program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan diberikan pada tiap-tiap keluarga miskin tiap bulanya, namun upaya tersebut belum sepenuhnya mengurangi kemiskinan.

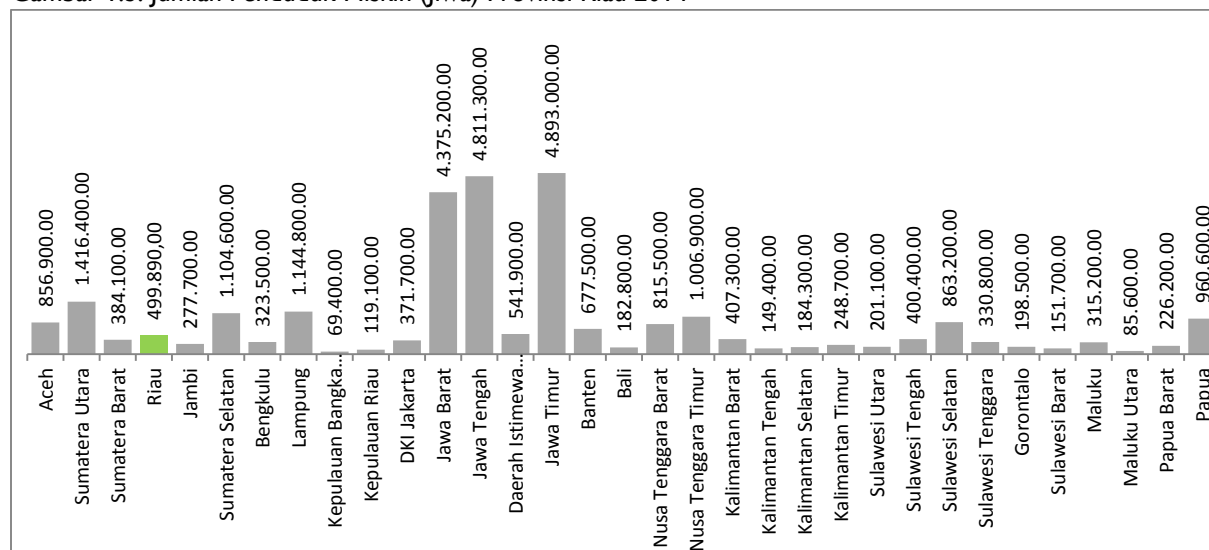
Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010 migrasi masuk meningkat di Riau mencapai 8,8%. Tingkat migrasi masuk ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk

Riau yang hanya mencapai 3,58% per tahun. Perkembangan ekonomi Riau dan banyaknya perusahaan skala nasional dan multinasional di Riau. Hal ini memicubanyak migrasi terutama migrasi di perkotaan dibandingkan dengan migrasi di perdesaan. Data Sensus Penduduk menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 11,00% migrasi di perkotaan Riau, sedangkan migrasi perdesaan hanya 7,3%.

Secara relatif jumlah penduduk miskin di Riau dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin diantara provinsi di Indonesia masih dalam kategori rendah. Beberapa provinsi memiliki jumlah penduduk miskin yang sangat banyak dan Riau berada pada posisi nomor 14 daerah provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia.

Posisi relatif tingkat kemiskinan di Provinsi Riau pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin sebanyak 499.890 jiwa (Gambar 1.3). Jumlah penduduk miskin di Riau ini berada pada posisi 14 dengan jumlah penduduk miskin terbanyak diantara 33 provinsi di Indonesia, dan nomor empat terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Sumatera Utara, Lampung dan Sumatera Selatan.

Gambar 1.3: Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Riau 2014



Analisis terhadap relevansi perkembangan capaian indikator jumlah penduduk miskin ditujukan untuk menilai sejauh mana pembangunan yang dijalankan di provinsi Riau dapat mendukung target nasional. Relevansi capaian suatu indikator kemiskinan di Riau terlihat sudah relevan dengan perkembangan capaian indikator nasional. Hal tersebut tergambar dari tingkat kemajuan capaian indikator di Provinsi Riau menunjukkan lebih besar daripada tingkat kemajuan yang terjadi secara nasional. Ini menunjukkan bahwa perkembangan capaian indikator di provinsi Riau sangat relevan terhadap kemajuan capaian indikator nasional.

Meski Pemerintah Provinsi Riau telah berhasil menurunkan kemiskinan, namun perlu diperhatikan bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*). Persoalan penanggulangan kemiskinan selain harus mampu memperkecil jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan kemiskinan sebaiknya harus bisa juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta ketimpangannya antara kota dan pedesaan.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan suatu daerah. Wongdesmiati (2009) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, yaitu jumlah penduduk, produk domestik bruto dan usia harapan hidup. Selain ketiga faktor diatas, Prastyo (2010), Saputra (2011) dan Permana (2012) menjelaskan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kesehatan dan jumlah pengangguran. Sedangkan menurut Brata (2005) kemiskinan juga dipengaruhi oleh investasi dan pengeluaran pemerintah daerah.

Selain itu, timbulnya kemiskinan juga dikarenakan oleh rendahnya kemampuan

masyarakat mengakses lapangan kerja dan sedikitnya peluang masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja. Kondisi ini diperburuk oleh banyaknya tenaga kerja yang di-PHK akibat para pengusaha dalam negeri maupun luar negeri gulung tikar dan melarikan modalnya ke luar negeri. Untuk mengatasi keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk memikirkan berbagai tindakan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan serta pengangguran.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon perubahan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Riau dari hasil analisis tersebut dapat dirumuskan rekomendasi pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau.

Tinjauan Pustaka

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional, karena tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi saja, melainkan telah meluas ke dimensi-dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Kemiskinan itu sendiri sering didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu atau tidak memiliki kecukupan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar hidupnya seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.

Penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Riau dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin. Nilai garis kemiskinan digunakan mengacu pada kebutuhan minimum 2.100 kkal per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi kebutuhan dasar untuk papan, sandang, sekolah, transportasi serta kebutuhan

rumahtangga dan individu yang mendasar lainnya. Besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan tersebut disebut garis kemiskinan (BPS Provinsi Riau, 2014).

Bappenas (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menurut BPS Provinsi Riau (2009), secara konseptual definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: (1) Kemiskinan Absolut dan (2) Kemiskinan Relatif.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai salah satu indikator dalam mengukur tingkat pembangunan ekonomi (prestasi ekonomi) suatu negara. Menurut Budiono (1999), pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output nasional per kapita dalam jangka panjang. Kata proses dari kalimat diatas mengandung unsur perubahan dan indikator pertumbuhan ekonomi yang dilihat dalam kurun waktu cukup yang panjang. Menurut Todaro dan Smith (2006), terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu: (1) Akumulasi Modal, (2) Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja dan (3) Kemajuan Teknologi.

Masalah kemiskinan tidak dapat dipecahkan begitu saja hanya dengan mengharapakan efek menetes kebawah dari pertumbuhan ekonomi. Siregar dan Wahyuniarti (2008) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi memang menjadi syarat untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Adapun syarat untuk mengurangi kemiskinan adalah hasil dari pertumbuhan

ekonomi tersebut menyebar di setiap golongan masyarakat, termasuk golongan penduduk miskin. Dalam penelitiannya Wongdesmiwati (2009), ia menemukan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang negatif. Artinya, kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa mempercepat pertumbuhan ekonomi penting untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Menurut Sukirno (2006), jumlah penduduk merupakan masalah mendasar dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi, yaitu kesejahteraan rakyat dan menekan angka kemiskinan. Perkembangan jumlah penduduk dapat menjadi faktor penghambat dan pendorong dalam pembangunan. Dikatakan sebagai faktor penghambat pembangunan karena perkembangan jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menurunkan produktivitas dan akan terjadi peningkatan pengangguran, sehingga menambah beban pembangunan. Sedangkan dikatakan sebagai faktor pendorong karena: (a) meningkatkan jumlah tenaga kerja; (b) terjadi perluasan pasar, hal ini dikarenakan luas pasar barang dan jasa ditentukan oleh pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan masalah yang banyak dialami oleh negara sedang berkembang. Masalah kependudukan yang dihadapi, yaitu tingginya tingkat fertilitas dan tingkat mortalitas, namun angka fertilitasnya masih lebih tinggi. Angka fertilitas yang tinggi tersebut dapat disebabkan oleh pernikahan di usia dini dan kurangnya pengetahuan mengenai keluarga berencana. Sedangkan angka mortalitas yang tinggi disebabkan oleh kualitas kesehatan masyarakat yang masih rendah.

Menurut Todaro dan Smith (2006), modal pembangunan dikatakan handal apabila jumlah penduduk yang besar diikuti dengan kualitas sumberdaya manusia yang memadai, akan tetapi apabila kualitas sumberdaya manusianya rendah justru akan menjadi beban bagi pembangunan suatu negara. Banyak penelitian yang telah membuktikan adanya keterkaitan yang positif antara jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Wahyuniarti (2008), Wongdesmiati (2009), yang mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara jumlah penduduk yang besar dan peningkatan jumlah penduduk miskin.

Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro dan Smith, 2006). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan, menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Todaro (2000) mengemukakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan tersedianya tenaga kerja yang terampil dan terdidik menjadi syarat penting dalam proses berlangsungnya pembangunan ekonomi secara berkesinambungan. Selain itu, dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan sektor pendidikan yang sangat strategis terutama dalam mendorong akumulasi modal yang dapat mendukung produksi dan aktivitas ekonomi lainnya.

Pendidikan dan kemiskinan memiliki keterkaitan yang sangat besar karena pendidikan dapat meningkatkan kemampuan individu untuk berkembang lewat penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dalam penelitiannya Siregar dan Wahyuniarti (2008) menemukan bahwa pendidikan yang diukur dengan melihat jumlah penduduk yang lulus SMP, SMA, dan Diploma memiliki pengaruh besar dan sangat signifikan dalam pengurangan jumlah penduduk. Hal tersebut mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia melalui peningkatan pendidikan merupakan determinan penting dalam proses penurunan jumlah penduduk miskin.

Menurut Todaro dan Smith (2006), salah satu inti dari kesejahteraan adalah kesehatan. Kesehatan merupakan aspek yang penting dalam pembangunan berkelanjutan dan menjadi syarat bagi peningkatan produktivitas. Sumberdaya manusia (SDM) yang sehat dan kuat merupakan modal dasar penting dalam pembangunan ketersediaan air bersih, akses terhadap layanan kesehatan, gizi yang baik, ketersediaan pangan yang cukup, dan tempat tinggal yang bebas polusi semuanya menyebabkan terjaminnya kesehatan penduduk. Jika sejumlah faktor tersebut diabaikan, maka akan mempengaruhi resiko kesehatan penduduk yang pada akhirnya akan menghambat terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Kesehatan merupakan tolok ukur utama dari pembangunan dan kesejahteraan nasional suatu bangsa. Dengan demikian kesehatan harus menjadi arus utama pembangunan berkelanjutan. Bukan hanya sebagai tolak ukur keberhasilan dari pembangunan suatu bangsa dan negara, namun hidup yang sehat adalah hak asasi manusia. Usia harapan hidup merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia harapan hidup menggambarkan umur rata-rata yang dapat

dicapai seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Apabila usia harapan hidup suatu daerah rendah hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan belum berhasil, dan sebaliknya semakin tinggi usia harapan hidup menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan di daerah tersebut berhasil (BPS Provinsi Riau, 2011).

Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang banyak dialami oleh negara-negara di dunia. Seseorang dapat dikatakan sebagai pengangguran apabila ia yang telah tergolong sebagai angkatan kerja, secara aktif sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu, akan tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran dapat mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat, yang berdampak pada penurunan tingkat kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat (Sumarsono, 2003).

Menurut Sukirno (2005), Pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat, yang akan berakibat pada penurunan tingkat kemakmuran yang ingin dicapai. Pengangguran dapat menimbulkan masalah ekonomi dan sosial bagi kehidupan seorang pengangguran. Kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun akibat menganggur maka akan berakibat pada peningkatan peluang mereka terjatuh dalam lingkaran kemiskinan dikarenakan mereka tidak memiliki pendapatan. Apabila tingkat pengangguran suatu negara tinggi, terjadi kekacauan politik dan sosial maka akan mengakibatkan efek buruk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Teori pertumbuhan Harrod-Domar menyatakan adanya hubungan yang positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Teori ini pada hakekatnya menekankan perlunya penanaman modal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Menurut Nurkse lingkaran kemiskinan di negara berkembang dapat

dipotong dengan pembentukan modal. Sehingga pembentukan modal dipandang sebagai salah satu faktor dan sekaligus sebagai faktor utama di dalam pembangunan ekonomi (Jhingan, 2008).

Selanjutnya Jhingan (2008), pembangunan ekonomi merupakan proses pembentukan modal *overhead* sosial dan ekonomi. Pembentukan modal dapat dilakukan apabila laju pembentukan modal di dalam negeri cukup cepat, yaitu pada saat pendapatan masyarakat lebih besar yang diinvestasikan daripada digunakan untuk konsumsi. Pembentukan modal juga menciptakan perluasan pasar, membantu menyingkirkan ketidaksempurnaan pasar dengan menciptakan modal *overhead* sosial dan ekonomi. Jadi investasi dapat memotong rantai kemiskinan baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan

Sukirno (2006) menjelaskan bahwa investasi digolongkan kepada komponen perbelanjaan agregat yang bersifat otonomi, yaitu tingkat investasi yang berlaku tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Dalam analisis Keynes menunjukkan dua faktor penting yang menentukan investasi, yaitu suku bunga dan ekspektasi masa depan mengenai keadaan kegiatan ekonomi.

Menurut Sukirno (2006), pengeluaran pemerintah adalah keseluruhan pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pengeluaran untuk pengembangan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran pemerintah juga dipandang sebagai perbelanjaan otonomi karena pendapatan nasional bukanlah merupakan faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan pemerintah untuk menentukan anggaran belanjanya.

Todaro (2006) mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Selain

itu, pengeluaran pemerintah dapat menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, juga merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat (*aggregate demand*) yang kenaikannya akan mendorong produksi atau PDB, sepanjang perekonomian belum mencapai tingkat kesempataaan kerja penuh (*full employment*).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data *time series* tahun 1993-2014. Data-data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau dan data-data dari sumber lain yang berupa jurnal ilmiah dan buku teks.

Penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan metode analisis *ordinary least square* (OLS). Model persamaan regresinya diformulasikan sebagai berikut:

$$JPM = b_0 + b_1PDRB + b_2JP + b_3RLS + b_4UHH + b_5PENG + b_6INV + b_7PP + U$$

(1)

Dimana: JPM = Jumlah Penduduk Miskin (jiwa),

PDRB = PDRB harga konstan tahun 2000 tanpa migas (Juta Rp)

JP = Jumlah Penduduk (jiwa)

RLS = Rata-rata lama sekolah (tahun)

UHH = Usia harapan hidup (tahun)

JPT = Jumlah pengangguran terbuka (jiwa)

INV = Investasi (Juta Rp)

PP = Pengeluaran Pembangunan (Juta Rp)

b_0 = *intercept*

$b_1...b_7$ = Koefisien regresi

u_t = Residual

t = 1, 2, 3, 4, 5 (data time-series, tahun 1993-2014)

Untuk membuktikan hipotesis, dilakukan analisis pada tingkat kepercayaan 90%. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Riau dilakukan dengan uji t . Apabila $t_{hitung} > Pr |t|$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sampai dengan toleransi *Level of Significance* (α) 10%. Hipotesis yang akan diuji meliputi:

- (1) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin;
- (2) Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin;
- (3) Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin;
- (4) Usia harapan hidup berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin;
- (5) Jumlah pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin;
- (6) Investasi berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin;
- (7) Pengeluaran pembangunan berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin;

Model ekonometrika yang baik harus memenuhi uji asumsi klasik, yaitu dengan melakukan uji multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas. Menurut Widarjono (2009), uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Untuk mendeteksi multikolinieritas dalam suatu model dilakukan dengan melihat *Variance Inflation Factor*. Apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Adapun persamaan *Variance Inflation Factor*, sebagai berikut:

$$Variance\ Inflation\ Factor = 1 / tolerance.....(2)$$

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Untuk menguji autokorelasi dengan

menggunakan *Durbin-Watson*, dengan formula sebagai berikut (Widarjono, 2009):

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (\hat{e}_t - \hat{e}_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n \hat{e}_t^2} \dots\dots\dots (3)$$

dimana d = koefisien *Durbin-Watson*; t = t hitung; n = sampel; e = residual. Nilai d yang diperoleh dibandingkan dengan nilai d_U dan d_L . Apabila $0 < d < d_L$ atau $4 - d_L < d < 4$ berarti terdapat autokolerasi, bila nilai d terletak antara $d_L < d < d_U$ atau $4 - d_U < d < 4 - d_L$ berarti tidak dapat dipastikan adanya autokolerasi, bilamana $d_U < d < 4 - d_U$ berarti tidak ada autokolerasi positif/negatif.

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan *Shapiro-Wilk* dengan formula sebagai berikut (Verbeek et al., 2000):

$$W = \frac{[\sum_{i=1}^h a_n (\tilde{e}_{(v-1+1)} - \tilde{e}_{(i)})]^2}{\sum_{i=1}^h (\tilde{e}_i - \bar{\tilde{e}})^2} \dots\dots\dots (4)$$

dimana $v = T - kn_j$; $h = n/2$ untuk bilangan genap atau $(n-1)/2$ untuk bilangan ganjil; v = derajat bebas; T = jumlah observasi; K = jumlah variabel; a_{in} = parameter penduga dari statistik *Shapiro-Wilk*. Apabila nilai W mendekati 1 dan signifikan maka model yang dibangun berdistribusi normal.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk apakah kondisi varian dari variabel pengganggu tidak konstan untuk semua observasi, yaitu dengan menggunakan *White test*. Secara manual, uji ini dilakukan dengan meregresi residual kuadrat ($\hat{e}_i^2$) dengan variabel bebas. Dapatkan nilai R^2 , untuk menghitung χ^2 , dimana $\chi^2 = \text{Obs} \times R\text{-square}$. Kriteria yang digunakan adalah apabila χ^2_{df} tabel < nilai $\text{Obs} \times R\text{-square}$, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model dapat ditolak (Widarjono, 2009).

Setelah diperoleh nilai koefisien regresi kemudian dihitung nilai elastisitas. Perhitungan nilai elastisitas digunakan untuk mengetahui

seberapa besar derajat kepekaan variabel dependen terhadap perubahan yang terjadi pada variabel dependen dalam suatu persamaan, yakni elastisitas jangka pendek dan jangka panjang (Hessie, 2009). Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$E_{SR} = a_t \frac{\bar{X}_t}{\bar{Y}_t} \dots\dots\dots (5)$$

$$E_{LR} = \frac{E_{SR}}{1 - \text{Koefisien Lag Peubah dependen}} \dots\dots\dots (6)$$

Dimana E_{SR} = elastisitas jangka pendek (*short term*) variabel dependen, Y , terhadap variabel independen, X_t ; E_{LR} = elastisitas jangka pendek (*short term*) variabel dependen, Y , terhadap variabel independen X_t ; $\bar{X}_t$ = nilai rata-rata variabel independen X ke- t ; $\bar{Y}_t$ = nilai rata-rata variabel dependen, Y ke- t ; a_i = parameter dugaan variabel independen ke- t . Jika nilai elastisitas lebih besar dari satu berarti variabel dependen, Y , responsif terhadap variabel independen, X_t . Jika nilai elastisitas lebih kecil dari satu berarti variabel dependen, Y , tidak responsif terhadap variabel independen, X_t .

Untuk mengetahui apakah suatu model cukup baik dalam analisis simulasi kebijakan digunakan validasi model. Dalam penelitian ini validasi model menggunakan kriteria statistik, yaitu U_M (*Bias Propotion*) dan $U\text{-Theil}$ (Koutsoyiannis, A. 1977).

* U_M (Bias Proportion)

$$U_M = \frac{(P - A)^2}{\sum (P_i - A_i)^2 / n}$$

* $U\text{-Theil's}$ (*Theil's Inequality Coefficient*)

$$U = \frac{\sqrt{1/n * \sum (P_i - A_i)^2}}{\sqrt{(1/n) * \sum (P_i)^2 + (1/n) * \sum (A_i)^2}}$$

U_M = Bias Proportion

n = jumlah observasi/pemerhatian

P_i = nilai pendugaan model (*predicted*)
 A_i = nilai pengamatan contoh
 (actual)

Statistik U_M (*Bias Propotion*) digunakan untuk mengukur tingkat penyimpangan nilai estimasi peubah endogen dari nilai aktual peubah endogen dalam ukuran relatif atau untuk mengukur kedekatan nilai dugaan tersebut dengan nilai aktualnya. Sedangkan untuk mengetahui kemampuan model dalam analisis simulasi peramalan digunakan statistik U . Nilai koefisien *Theil* (U) terletak antara 0 dan 1. Jika $U = 0$, dapat dikatakan pendugaan model sempurna, tetapi jika $U = 1$ maka pendugaan model naif. Untuk melihat keeratan arah (*slope*) antara aktual dengan hasil yang disimulasi dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2). Pada dasarnya makin kecil nilai U_M dan U -*Theil's* dan makin besar nilai R^2 , maka pendugaan model semakin baik.

Analisis simulasi kebijakan untuk melihat dampak kebijakan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Riau. Skenario simulasi tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Produk Domestik Regional Bruto naik 11%
 Nilai 11% dilihat dari tren produk domestik regional bruto dari tahun 2005-2014 dengan rata-rata 11%.
- (2) Jumlah Penduduk naik 2%
 Nilai 3% dilihat dari tren jumlah penduduk dari tahun 2005-2014 dengan rata-rata 3%.
- (3) Investasi naik 7 %
 Nilai 7 % dilihat dari tren investasi dari tahun 2005-2014 dengan rata-rata 7%.
- (4) Pengeluaran Pembangunan naik 18%
 Nilai 18% dilihat dari tren pengeluaran pembangunan dari tahun 2005-2014 dengan rata-rata 18%.
- (5) Jumlah penduduk naik 3% dan investasi naik 7%

- (6) Jumlah penduduk naik 3% dan pengeluaran pembangunan naik 18%
- (7) Produk Domestik Regional Bruto naik 11%, investasi naik 7%, pengeluaran pembangunan naik 18 % dan jumlah penduduk turun 3%.

Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian metode penelitian untuk memperoleh hasil yang baik pada suatu model yang dianalisis dengan metode *ordinary least square*, perlu dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan normalitas. Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) semua variabel bebas berada dibawah 10, dimana batas maksimum VIF sebesar 10. Berdasarkan nilai VIF semua variabel bebas, dapat disimpulkan bahwa dalam model yang dibangun tidak terjadi multikolinieritas.

Model yang dibangun juga tidak mengalami masalah autokorelasi. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Durbin-Watson* (DW) pada model yang dibangun mendekati 2, yaitu sebesar 1,647. Selain itu, masalah heteroskedastisitas juga tidak terjadi dimana nilai *Probability Obs*R-squared* sebesar 48,04% > α , yaitu 10% sehingga H_0 diterima. Uji normalitas menggunakan uji statistik *Shapiro-Wilk* sebesar 0,92, berbeda nyata dengan 0,08 pada taraf nyata 10%. Hal ini mengindikasikan bahwa model yang dibangun berdistribusi normal.

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) model penelitian yang diperoleh sebesar 0,6276. Hal ini menunjukkan bahwa 62,76% variabel kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, jumlah penduduk, pendidikan, kesehatan, investasi dan pengeluaran pembangunan, sedangkan 37,34% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam persamaan.

<i>Variabel</i>	<i>Parameter Estimate</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Value</i>	<i>Pr > t </i>	<i>Variance Inflation</i>	<i>E_{SR}</i>
<i>Intercept</i>	788187	196544	4.01	0.0015	0	-
Produk Domestik Regional Bruto	-0.00057	0.000408	-1.39	0.1874	2.00155	-
Jumlah penduduk	0.03277	0.05915	0.55	0.589	9.24139	-
Rata-rata lama sekolah	-87885	33070	-2.66	0.0197	6.42035	-1.28
usia harapan hidup	-66727	23877	-2.79	0.0152	1.24847	-8.74
Pengangguran	1.3637	0.30363	4.49	0.0006	2.37756	0.44
investasi	0.00814	0.00772	1.05	0.3109	7.58151	-
pengeluaran pembangunan	-0.00567	0.04306	-0.13	0.8972	1.22955	-
R ² = 65,79%		Pr > F = 0,0228		DW = 1,647		

Tabel 4.1:

Hasil Estimasi Model Faktor Dominan Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Riau

Berdasarkan hasil estimasi model pada Tabel 4.1 diketahui bahwa terdapat 3 variabel yang berpengaruh nyata terhadap kemiskinan, yaitu rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup dan jumlah pengangguran. Hasil estimasi yang diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan pada $\alpha = 10\%$. Koefisien regresi rata-rata lama sekolah sebesar -87.885, artinya apabila rata-rata lama sekolah meningkat 1 tahun akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 87.885 jiwa. Rata-rata lama sekolah memiliki nilai elastisitas yang negatif sebesar 1,28 yang berarti setiap peningkatan 1% rata-rata lama sekolah akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 1,287%. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan responsif secara negatif terhadap rata-rata lama sekolah. Menurut Arsyad (2010), yang menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pelatihan untuk golongan miskin, sehingga pengetahuan dan keahlian akan meningkatkan produktivitas dan efektivitas penduduk miskin. Oleh karena itu, dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin dapat dilakukan dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah melalui pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun dengan memberikan beasiswa

kepada anak-anak miskin. Dengan adanya investasi pendidikan, diharapkan mampu memotong rantai kemiskinan di Provinsi Riau.

Usia harapan hidup berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin dengan $\alpha = 10\%$. Koefisien regresi usia harapan hidup sebesar -66.727, artinya apabila usia harapan hidup meningkat 1 tahun maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 66.727 jiwa. Usia harapan hidup memiliki nilai elastisitas yang negatif sebesar 8,74, artinya setiap peningkatan usia harapan hidup 1% akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 8,74%. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan responsif terhadap usia harapan hidup, sehingga dapat memberikan gambaran bahwa usia harapan hidup merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Hasil ini senada dengan teori dimana negara-negara dengan tingkat kesehatan yang lebih baik, maka usia harapan hidup penduduknya lebih lama, sehingga secara ekonomis memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Arsyad (2010), menjelaskan bahwa intervensi untuk memperbaiki kesehatan merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, untuk meningkatkan usia harapan hidup dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis

kepada rumah tangga miskin, peningkatan kualitas gizi balita dan ibu.

Jumlah pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin dengan $\alpha = 10\%$. Nilai koefisien regresi jumlah pengangguran sebesar 1,3637 artinya apabila jumlah pengangguran meningkat 1 jiwa akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 1,3637 jiwa. Jumlah pengangguran memiliki elastisitas sebesar 0,37, artinya peningkatan jumlah pengangguran sebesar 1% akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,37%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengangguran tidak responsif terhadap jumlah penduduk miskin, karena nilai elastisitas pengangguran lebih kecil dari 1. Hasil tersebut sesuai dengan pendapat Sukirno (2004) dan Adit Agus Prastyo (2010), peningkatan jumlah pengangguran berdampak pada pengurangan pendapatan masyarakat dan akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai. Secara individu pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial bagi mereka yang mengalaminya. Keadaan tersebut memaksa para pengangguran untuk mengurangi pengeluaran konsumsinya. Dengan demikian, untuk mengurangi jumlah pengangguran dapat dilakukan melalui kebijakan perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas serta produktivitas tenaga kerja melalui program-program pembangunan dan menciptakan iklim investasi yang bersifat padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja yang berasal dari rumah tangga miskin.

Hasil simulasi perubahan kebijakan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Riau. simulasi perubahan kebijakan terhadap variabel dependen dalam simulasi dapat berpengaruh secara positif maupun negatif terhadap variabel dependennya. Skenario simulasi ini menggunakan empat variabel, yaitu variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Hasil

simulasi keempat variabel dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Skenario	Nilai (Jiwa)	Perubahan (%)
Skenario dasar		-
	539,140	
Skenario 1	535,244	-0.73
Skenario 2	551,634	2.26
Skenario 3	537,207	-0.36
Skenario 4	537,837	-0.24
Skenario 5	549,700	1.92
Skenario 6	550,331	2.03
Skenario 7	519,514	-3.78

Tabel 4.2: Hasil Simulasi Historis Perubahan Kebijakan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Keterangan:

Skenario 1 : Produk Domestik Regional Bruto naik 11%
 Skenario 2 : Jumlah Penduduk naik 3%
 Skenario 3 : Investasi naik 7%
 Skenario 4 : Pengeluaran Pembangunan naik 18%
 Skenario 5 : Jumlah Penduduk naik 3% dan Investasi naik 7%
 Skenario 6 : Jumlah Penduduk naik 3% dan Peng. Pembangunan naik 18%
 Skenario 7 : Produk Domestik Regional Bruto naik 11%, Investasi naik 7%, Pengeluaran Pembangunan naik 18% dan Jumlah Penduduk turun 3%

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat hasil simulasi untuk skenario 1, yaitu peningkatan Produk Domestik Regional Bruto 11% berdampak terhadap penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,73%. Hasil yang berbeda pada skenario 2, yaitu peningkatan jumlah penduduk sebesar 3% akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 2,26%. Skenario

3 menunjukkan bahwa peningkatan investasi 7% akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,36%. Selanjutnya pada skenario 4, yaitu pengeluaran pembangunan meningkat sebesar 18% akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,24.

Hasil simulasi yang berbeda dilihat pada skenario 5 yang bertanda positif yang mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk 3% dan investasi 7% juga akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 1,92%. Pada skenario 6 dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah penduduk 3% dan peningkatan pengeluaran pembangunan 18%, akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 2,03%. Skenario 7 menunjukkan bahwa apabila peningkatan Produk Domestik Regional Bruto 11%, peningkatan investasi 7% dan pengeluaran pemerintah 18% diikuti dengan penurunan jumlah penduduk sebesar 3% akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 3,78%.

Berdasarkan hasil simulasi perubahan kebijakan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, investasi dan pengeluaran pembangunan yang disertai dengan penurunan jumlah penduduk memiliki kontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin tertinggi, yaitu sebesar 3,78%. Hasil simulasi perubahan kebijakan ini memberikan gambaran bahwa investasi dan pengeluaran pembangunan menjadi faktor penting untuk mengurangi jumlah penduduk miskin apabila diikuti dengan penurunan jumlah penduduk

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Riau yaitu rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup dan pengangguran. Berdasarkan nilai elastisitas tersebut diketahui kemiskinan di

Provinsi Riau responsif pada jangka pendek terhadap variabel rata-rata lama sekolah dan usia harapan hidup.

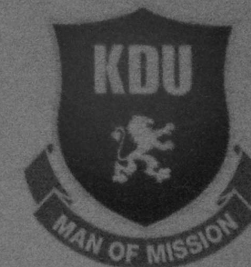
Kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi, pengeluaran pembangunan dan penurunan jumlah penduduk berdampak positif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau. Artinya, kombinasi kebijakan-kebijakan tersebut mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau.

Penelitian ini merekomendasikan untuk mengentaskan kemiskinan melalui (1) Peningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata di setiap golongan pendapatan melalui penciptaan iklim investasi dan berusaha yang kondusif serta investasi yang bersifat padat karya harus ditingkatkan, (2) Pengendalian jumlah penduduk melalui program keluarga berencana perlu dipertahankan, (3) Peningkatkan IPM pendidikan melalui peningkatan rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup. program wajib belajar 12 tahun yang konsisten dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak miskin, (4) Peningkatkan kesehatan melalui pelayanan kesehatan gratis, peningkatan kualitas gizi bayi dan ibu, (5) Peningkatkan program-program pembangunan bersifat padat karya dan memberikan penyuluhan serta pembinaan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan (6) Peningkatkan pengeluaran pembangunan melalui anggaran yang dikeluarkan dalam penanggulangan kemiskinan diwujudkan melalui berbagai program yang berfokus pada peningkatan tingkat pendidikan, kesehatan, pelayanan perumahan, subsidi, dll.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan. STIM YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2013. Statistik Kesejahteraan Provinsi Riau. Badan Pusat Statistik Riau, Pekanbaru.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2014. Riau Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Riau, Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2015. Riau Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Riau, Pekanbaru.
- Brata, Aloysius Gunadi. 2005. Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia Dan Kemiskinan. Lembaga Penelitian - Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Bappenas. 2010. Bab 16 Penanggulangan Kemiskinan. <http://www.bappenas.go.id/files/5413/6082/9497/bab-16-penanggulangan-kemiskinan.pdf>. Diakses 24 Januari 2015 Pukul 09.18 WIB.
- Budiono. 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi. BPFE, Yogyakarta
- Intriligator, M. D. 1978. Econometric Model, Techniques, and Applications. Prentice Hall Inc. New Jersey.
- Jhingan ML. 2008. Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Koutsoyiannis, A. 1977. Theory of Econometrics. Harper and Row Publisher Inc. New York.
- Todaro, MP. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Ketujuh. Erlangga. Jakarta.
- Permana, Anggit Yoga. 2012. Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009. Jurnal IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro 1(1):1.
- Prastyo, Adit Agus. 2010. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007). Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pyndyck, R. S and D. L Rubenfield. 1991. Econometric Models and Economic Forecasts. Third Edition McGraw-Hill Inc, New York.
- Siregar, H dan Dwi Wahyuniarti. 2008. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/PROS_2008_MAK3.pdf. Diakses 15 Mei 2013 Pukul. 20.25 WIB.
- Sukirno, Sadono. 2005. Makroekonomi: Teori Pengantar. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2006. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan. Kencana, Jakarta
- Sumarsono, Sonny. 2003. Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Ketujuh. Erlangga, Jakarta.
- Todaro, Michael dan Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kesembilan. Erlangga. Jakarta.
- Verbeek, M. 2000. A Guide to Modern Econometrics. John Wiley & Sons Ltd, Chichester.
- Widarjono, A. 2009. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis. Ekonisia, Jakarta.
- Wongdesmiati. 2009. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Ekonometrika. <http://wongdesmiwati.files.wordpress.com/2009/10/pertumbuhan-ekonomi-dan-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-analisis-ekonometrika.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2013.



INTER ISLAMIC UNIVERSITY COOPERATION OF INDONESIA (IIUC)

CERTIFICATE

Awarded to

Heriyanto

has participated as

PRESENTER

at international seminar conducted by Muhammadiyah University of Palangkaraya in collaboration with IIUC and Kyungdong University of South Korea at 25th – 27th April 2017 in Muhammadiyah University of Palangkaraya.

Palangka Raya, April 27th 2017

Chairman of
IIUC,

Prof. Dr. H. Masrurah Mokhtar, MA.

Secretary of
IIUC,



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.



Muhammadiyah University of
Palangkaraya
Rector,

Dr. Bulkani, M.Pd.



INTER ISLAMIC UNIVERSITY COOPERATION OF INDONESIA (IIUC)

CERTIFICATE

Awarded to

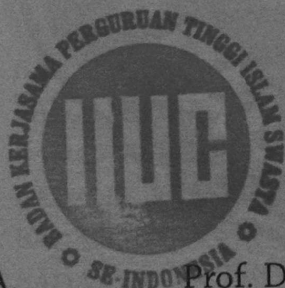
Heriyanto

2nd winner of the oral presentation in category: Globalization, Asean Economic Community (AEC), Economic Growth

at international seminar conducted by Muhammadiyah University of Palangkaraya in collaboration with IIUC and Kyungdong University of South Korea at 25th – 27th April 2017 in Muhammadiyah University of Palangkaraya.
Palangka Raya, April 27th 2017

Chairman of
IIUC,

Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA.



Secretary of
IIUC,

Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.

Muhammadiyah University of
Palangkaraya
Rector,



Dr. Bulkani, M.Pd.